

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Strategi pemberdayaan PMKS yang dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi setelah di analisis menggunakan teori ACTORS yang dikemukakan oleh Sarah Cook dan Steve Macaulay menunjukkan bahwa tidak ada strategi khusus yang digunakan dalam pelaksanaan pemberdayaan PMKS. Pertama *Authority* atau wewenang para stakeholder dalam pemberdayaan PMKS antara lain; Pemerintah Kota Bukittinggi dengan menetapkan Perda Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, serta Dinas Sosial dan BAZNAS yang melaksanakan kebijakan dalam Perda Nomor 11 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang mencakup Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial serta pelatihan seperti pelatihan menjahit dan program baru seperti Baling Bambu dalam pemberdayaan PMKS.

Kedua *Confidence* atau percaya diri dengan menanamkan kepercayaan diri pada masyarakat PMKS dengan memberikan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri PMKS. Ketiga *Trust* atau keyakinan dengan membangun keyakinan membangun keyakinan masyarakat PMKS untuk bisa berubah dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan norma-norma masyarakat melalui bimbingan mental dan spiritual. Keempat *Opportunity* atau kesempatan yang diberikan pemerintah melalui stakeholder terkait pada masyarakat PMKS seperti di dalam Perda Nomor 11 tahun 2019 yang memuat poin pemberdayaan

yaitu ; Rehabilitasi Sosial seperti memberikan bantuan rehabilitasi sosial terhadap pencandu napza, Jaminan Sosial seperti kerjasama RSUD dengan BPJS dalam memberikan jaminan kesehatan bagi PMKS, Pemberdayaan Sosial seperti pemberian bantuan pada KUBE dan melaksanakan pelatihan seperti pelatihan menjahit dan keterampilan, Per;indungan Sosial seperti pemberian bantuan gempa dan bantuan kebakaran.

Kelima *Responsibility* atau tanggung jawab, tanggung jawab dalam pemberdayaan PMKS tentu melibatkan semua pihak yang terlibat baik itu para stakeholder yang melakukan pemberdayaan ataupun masyarakat yang diberdayakan. Tanggung jawab dari stakeholder seperti Dinas Sosial yang bisa dilihat dari komitmen Dinas Sosial dalam menjalankan kebijakan serta dilihat dari data PMKS yang menurun serta data capaian SPM bidang sosial tahun 2022 yang mencapai target dengan baik. Sedangkan tanggung jawab BAZNAS dan KUBE juga berkomitmen dalam menjalankan program pemberdayaan serta tanggung jawab masyarakat untuk berdaya dan diberdayakan.

Keenam *Support* atau dukungan dalam pemberdayaan PMKS. Dukungan dari pemerintah hadir dalam bentuk dukungan Dukungan dana melalui APBD, bantuan sosial dari pusat, dan membuat pelatihan dan bimbingan sesuai kebutuhan masyarakat yang kemudian dijalankan dalam proses pemberdayaan PMKS. Tentu untuk menghasilkan dan menciptakan pemberdayaan PMKS yang baik harus adanya dukungan semua elemen yang terlibat baik itu para stakeholder ataupun masyarakat sebagai objek yang diberdayakan.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Teoritis

1. Pada penelitian ini hanya fokus menganalisis strategi pemberdayaan PMKS yang dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi. Saran dalam penelitian kedepannya adalah diharapkan peneliti selanjutnya untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat atau PMKS lebih dalam seperti menganalisis kebijakan pemerintah.

2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menggunakan teori lain dalam menjelaskan analisis pemberdayaan masyarakat, agar memiliki kebaruan lain dalam meneliti pemberdayaan masyarakat.

6.2.2 Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah Bukittinggi dan lainnya dalam hal pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bukittinggi.

2. Melalui penelitian ini, diharapkan pemerintah lebih aktif dan peka tentang posisinya sebagai penyedia layanan dalam memberdayakan PMKS. Pemerintah dituntut lebih peduli terhadap masyarakat dalam pemberdayaan PMKS seperti membuat inovasi kebijakan dan program dalam pemberdayaan PMKS.

